



**STRATEGI DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI
PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DALAM MERAH SUARA
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

DESI RATNA SARI
NIM. 14 103 00008

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018



**STRATEGI DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI
PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DALAM MERAH SUARA
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

DESI RATNA SARI

NIM. 14 103 00008

Pembimbing I

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP.19620926 199303 1 001

Pembimbing II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018

Hal : Skripsi
a.n Desi Ratna Sari

Padangsidempuan, Juli 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

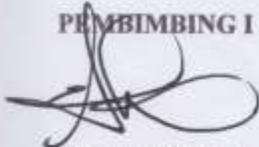
Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Desi Ratna Sari** yang berjudul "**Strategi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Padangsidempuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

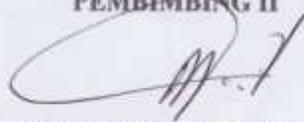
Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Ali Sati, M. Ag
NIP. 1962 0926 1993 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Desi Ratna Sari
NIM : 1410300008
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Strategi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Padangsidempuan

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 16 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Nama Desi Ratna Sari
NIM 1410300008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Ratna Sari
NIM : 1410300008
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Strategi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Padangsidempuan**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitian sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 16 Juli 2018



DESI RATNA SARI
NIM:1410300008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> -email : fasih.141nps@gmail.com

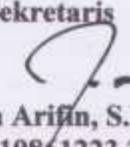
DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : DESI RATNA SARI
Nim : 1410300008
Judul : Strategi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Legislatif di Kota Padangsidimpuan

Ketua

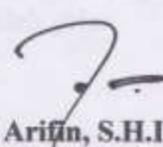

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

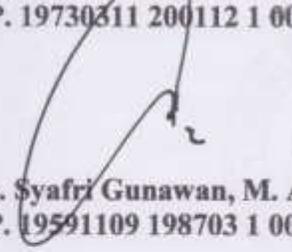
Sekretaris


Musa Arifin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861223 201503 1 004

Anggota


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004


Musa Arifin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861223 201503 1 004


Drs. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003


Dr. Ali Sati, M. Ag.
NIP. 19620926 199303 1 001

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Kamis, 16 Agustus 2018

Pukul

: 09.00 s/d 12. 00 WIB

Hasil/Nilai

: 77,25(B)

Indeks Pestari Kumulatif (IPK)

: 3,75 (Tiga KomaTigaTujuh lima)

Predikat

: CUMLAUDE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> -email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: /In.14/D/PP.00.9/09/2018

1322

Judul Skripsi : **Strategi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Legislatif di Kota Padangsidimpuan**

Ditulis Oleh : Desi Ratna Sari

Nim : 1410300008

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 19 September 2018

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia amin.

Skripsi dengan judul *Strategi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Padangsidempuan*. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Ibu Dermina Dalimunthe MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan sekaligus selaku penasehat akademik.

4. Bapak Dr. Ali. Sati, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
6. Teristimewa kepada Ayahanda (Alm. Himsar Siregar) dan Ibunda (Rosmina Nasution) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, Nenek (Alm. Asna Nasution) yang senantiasa semasa hidupnya merawat dan memberikan kasih sayang seutuhnya kepada Peneliti. Adeik-adik peneliti (Marwaji Siregar), (Yusnaini Siregar), (Indah Nirmala Sari Siregar) dan (Muhammad Pais Siregar), serta keluarga besar yang telah memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti serta selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman dan sahabatku Jurusan HTN (1) angkatan 2014, Ramadhan Siregar, Rizki Ananda, Ari Saputro, Arianto, Hanafi Rizki, Muhammad Hidayat, Rian, Hari Ati, Winda, Salamah, Karimun, Eka, Reu Nisa, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian. Adek- adek ku fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian yang selalu memberi dukungan dan membantu berbagai hal semoga kita semua sukses amin.
8. Terimakasih untuk sahabat-sahabat saya "Kos Gaor" yang selalu menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini Hotmawida Pulungan, Lisna Sari Harahap, Ummu Wasilah, Elpida Nora, dan sahabat Supardi Pohan. Dan teruntuk organisasi PMII yang telah memberi pelajaran mengenai artai

pentingnya sebuah kebersamaan serta bagaimana menghadapi banyak permasalahan.

9. Terimakasih kepada pengurus DPC PPP Kota Padangsidempuan yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
10. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semu amin.

Padangsidempuan, Juli 2018

Penulis

Desi Ratna Sari
NIM: 14 10300008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘.	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..’..	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
.....و	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dangaris atas
.....ى	Kasrah dan Ya	ī	i dangaris di bawah
.....و	Ḍommah dan Wau	ū	u dangaris di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddaha atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tandas *yaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *dasyaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diterangkan dan *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. **Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Desi Ratna Sari
Nim : 14 103 00008
Judul : Strategi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Padangsidimpuan.

Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu partai yang berasaskan Islam yang sudah memiliki sejarah panjang dan pengalaman yang matang dalam sejarah perjuangan Indonesia, terutama dalam hal menghiasi perpolitikan tanah air dengan segala suka dukanya. Namun, pada zaman reformasi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Padangsidimpuan tidak menunjukkan adanya peningkatan suara akan tetapi perolehan suara PPP mengalami penurunan, padahal mestinya perolehan suara PPP tinggi dilihat dari mayoritas penduduk Kota Padangsidimpuan muslim.

Dalam penelitian ini peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penyusunan strategi yang digunakan DPC PPP Kota Padangsidimpuan dalam meraih suara pada pemilihan legislatif di Kota Padangsidimpuan ? Bagaimana penerapan strategi DPC PPP Kota Padangsidimpuan dalam pemilihan legislatif di Kota Padangsidimpuan ? Apa saja kelemahan dan kelebihan DPC PPP Kota Padangsidimpuan untuk meraih suara dalam pemilihan legislatif di Kota Padangsidimpuan ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tipe penelitian ini adalah menggunakan deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam meraih suara pada pemilihan legislatif PPP Kota Padangsidimpuan melakukan penyusunan strategi, adapun proses penyusunan strategi PPP Kota Padangsidimpuan merupakan hasil diskusi dan analisis bersama atau yang dikenal dengan rakerwil (rapat kerja wilayah) dengan PAC dan Pimpinan Ranting. Setelah itu dilakukannya pembagian tugas untuk membentuk tim pemenangan.

Sedangkan dalam penerapannya DPC PPP Kota Padangsidimpuan menggunakan metode pola kampanye persuasif, yang bertujuan untuk memengaruhi dan meyakinkan para pemilih. Konsep persuasif PPP untuk memperoleh suara melalui pola kampanye adalah dengan memperkenalkan profil kandidat, membangun pendekatan kelompok, pendekatan saluran struktur tradisional.

Sedangkan kelemahan yang dimiliki PPP dalam meraih suara adalah terlalu mengandalkan tokoh, keterbatasan dana, serta lemahnya SDM PPP itu sendiri, sedangkan yang menjadi kelebihan dari PPP ialah PPP merupakan partai Islam dan memiliki program-program mengutamakan kepentingan umat serta PPP selalu berusaha secara maksimal dalam mengimplementasikan strategi yang telah disusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI
HALAM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLATE ARAB LATIN.....	v

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	12
1. Pengertian Strategi	12
2. Konseptualisasi Partai Politik	14
a. Defenisi Partai Politik	14
b. Fungsi Partai Politik	17
c. Tujuan Partai Politik	19
3. Strategi Parpol Dalam Meraih Suara	20
a. Komunikasi Politik	20
1) Defenisi Komunikasi Politik.....	20
2) Strategi Komunikasi Politik	21
3) Fungsi Komunikasi Politik.....	24
4) Tahapan Strategi Komunikasi Politik	25
b. Kampanye Politik.....	28
1) Defenisi Kampanye Politik	28
2) Tahapan Kampanye Politik.....	29
4. Pemilihan Umum Legislatif	32
a. Defenisi Pemilu.....	32
b. Tujuan Pemilihan Umum	35

B. Penelitian Terdahulu	41
-------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Jenis Penelitian	44
B. Subjek Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	48

BAB IV ANALISIS DATA

A. Deskripsi Hasil Penelitian	50
1. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....	50
2. Ideologi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....	51
3. Visi Dan Misi Partai Persatuan Pembangunan.....	51
4. Profil DPC PPP Kota Padangsidempuan.....	53
5. Prinsip Perjuangan DPC PPP Kota Padangsidempuan.....	54
6. Struktur Kepengurusan DPC PPP Kota Padangsidempuan.....	57
B. Hasil Penelitian	
1. Penyusunan Strategi DPC PPP Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Padangsidempuan	61
2. Penerapan Strategi DPC PPP Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Padangsidempuan	63
3. Kelemahan Dan Kelebihan PPP Kota Padangsidempuan	72
C. Pembahasan Hasil Penelitian	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAK

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah hak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan suatu sistem untuk memusyawarahkan wakil rakyat menduduki kursi kekuasaan melalui Pemilihan Umum. Dengan sistem demokrasi di Indonesia, rakyat bisa menentukan pilihannya masing-masing dan bisa menyalurkan aspirasi mereka melalui Pemilihan Umum.

Pada era pemerintahan Soeharto, pemilu dilaksanakan sebanyak 6 kali, yaitu, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, dengan kemenangan mutlak diraih oleh Golongan Karya. Pada pemilu pertama di masa Orde Baru, yaitu tahun 1971, yang diikuti oleh sepuluh kontestan, yaitu Golongan Karya, Nahdatul Ulama (NU), Parmusi, Perti, PSSI, PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, dan IPKI. Pada waktu itu, kepentingan golongan bagi partai politik menjadi prioritas. Kepentingan golongan lebih utama daripada kepentingan bersama, sehingga kepentingan nasional menjadi terabaikan. Hal ini mengancam persatuan, kesatuan bangsa dan mengganggu stabilitas nasional. Maka muncullah gagasan untuk menyederhanakan

organisasi kekuatan sosial politik kepada jumlah yang lebih kecil yang dikenal dengan istilah fusi.¹

Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah adanya ketentuan mengenai Pemilihan Umum dalam Pasal 22 E. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan dalam UUD 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara reguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).²

Ketentuan lebih lanjut dari amanat Pasal 22 E UUD 1945 diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pemilihan Umum yang disebut pemilu menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila Undang-

¹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 230.

² Undang-Undang Dasar 1945.

Undang Dasar 1945.³ Perencanaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan pemilu dilaksanakan atas asas-asas demokrasi yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sigit Pamungkas mendefinisikan sistem pemilu sebagai seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu lembaga perwakilan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sistem pemilu adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan kedalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.

Sedangkan Ibnu Tri Cahyo mendefinisikan pemilu merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.⁴

Dengan demikian, pemilu merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan kandidat-kandidat yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Di Indonesia partai politik merupakan bagian dari kehidupan politik. Pembentukan partai politik berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, yakni pemerintah yang dipimpin oleh mayoritas melalui Pemilihan Umum. Untuk menciptakan pemerintah yang mayoritas,

³Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas perubahan UU No 10 Tahun 2008, Ketentuan Umum BAB 1 ayat 1.

⁴Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 51.

diperlukan partai-partai yang dapat digunakan sebagai jalan politik untuk ikut dalam Pemilihan Umum.

Melalui partai politik, masyarakat dapat menyalurkan kehendak dan aspirasinya, serta berhubungan dengan lembaga-lembaga internasional guna mendapatkan dukungan atas perjuangan mereka. Partai politik muncul di Indonesia dari sebuah Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 Nopember 1945 tentang hak hidup partai-partai politik di Indonesia.

Upaya untuk meningkatkan citra Dewan Perwakilan Rakyat pusat maupun daerah yang berkualitas dan beribawa merupakan tugas konstitusional yang terus menerus memperbaiki, menyempurnakan dan meningkatkan tatanan kehidupan politik bangsa sebagai refleksi dari tekad bangsa untuk membangun kehidupan politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan demikian, demokrasi Pancasila terasa sebagai sebuah tatanan kehidupan politik bangsa yang benar-benar dijiwai oleh semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

Penyelenggaraan pemilihan legislatif di Kota Padangsidimpuan merupakan momentum penting bagi partai politik dalam menunjukkan eksistensinya. Bagi partai politik, pemilihan legislatif memiliki arti penting dalam mendapatkan suara yang banyak untuk memenangkan calon kandidat yang diusung oleh masing-masing partai politik dari pemilihan legislatif sebelumnya.

Perolehan suara yang didapatkan oleh partai politik pada pemilu dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya perilaku pemilih. Sebelum menjelang pemilihan

legislatif, maka setiap partai politik harus memperhatikan kualitas calon anggota legislatif tersebut, dengan melalui kaderisasi dalam setiap partai politik tersebut. Oleh karena itu, setiap partai politik harus mengusung calon legislatif tersebut dengan keahlian yang dimilikinya, tidak melihat dari ekonomi atau saudaranya. Tentunya, jika setiap partai politik cara merekrut calon legislatifnya bagus, maka hasilnya akan bagus dan membuat nama partai itu baik dipandang masyarakat.

Kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berkat rahmat Allah Subhanahu Wata'ala dan merupakan jembatan emas menuju masyarakat adil makmur yang di Ridhoi Allah Subhanahu Wata'ala dengan melaksanakan pembangunan spritual dan material di segala bidang kehidupan.

Bahwa sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, demi terwujudnya cita-cita proklamasi. Secara historis Partai Persatuan Pembangunan didirikan sebagai fusi dari empat partai Islam yaitu, partai Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi pada tanggal 30 Dzulqaidah 1392 H bertepatan pada tanggal 5 Januari 1973 M.⁵

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pernah meninggalkan asas Islam dan menggunakan asas negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan

⁵Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2009), hlm. 240.

perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP, tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dan segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai lengsernya Presiden Soeharto, 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J Habibie, Partai Persatuan Pembangunan kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah.

Secara resmi, itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir Tahun 1998. Walaupun Partai Persatuan Pembangunan kembali menjadikan Islam sebagai asas, Partai Persatuan Pembangunan tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII di Bandung 2011. Tujuan Partai Persatuan Pembangunan adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan rida Allah Subhanahu Wata'ala.⁶ Secara historis pemekaran Kota Padangsidimpuan 2001 disahkan oleh Mendagri, dan terbentuklah DPC PPP dengan terpilihnya ketua pertama Bulkayni Nasution.⁷

Di Kota Padangsidimpuan banyak berdiri partai yang berbasis Islam, meskipun demikian DPC PPP tetap berjuang keras dalam merebut simpati umat Islam. Ini dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh DPC PPP Kota Padangsidimpuan yang selalu berpihak dan perhatian kepada kepentingan umat

⁶Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan.

⁷Wawancara pribadi dengan Hasanuddin Sipahutar.

Islam di Kota Padangsidempuan. Inilah yang membuat keberadaan DPC PPP Kota Padangsidempuan tetap terjaga.

Pelaksanaan pemilu legislatif di Kota Padangsidempuan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bukan hanya dituntut untuk menjadi partai pemenang pemilu, namun lebih dari itu. Partai Persatuan Pembangunan harus mampu menempatkan kader-kader yang benar-benar mampu dan memiliki kredibilitas dan bukan hanya sekedar popularitas untuk ditempatkan di lembaga legislatif.

DPC Partai Persatuan Pembangunan di Kota Padangsidempuan belum menunjukkan peningkatan perolehan suara dalam meletakkan calon-calon di kursi legislatif. Fenomena ini muncul ketika sistem pemilu diubah dari proporsional tertutup pada pemilu 2004, menjadi proporsional terbuka pada pemilu 2009. Dalam sistem ini proporsional tertutup, kemenangan calon anggota legislatif ditentukan berdasarkan nomor urut. Sementara dalam sistem proporsional terbuka, kemenangan berdasarkan perolehan suara terbanyak.⁸

Pergeseran sistem ini membuat PPP harus mengubah strategi dalam merekrut dan menyusun daftar caleg untuk merebut kursi di lembaga perwakilan. Adapun strategi yang digunakan DPC PPP adalah:

⁸<http://nasional.kompas.com.Strategi-Baru-PPP>. Di akses pada tanggal 26/04/2018, pukul 21:19 WIB.

1. Melakukan internalisasi nilai-nilai keislaman dalam perjuangan politik dan menekankan bahwa DPC PPP tetap konsisten memperjuangkan aspirasi umat Islam.
2. Meningkatkan loyalitas konstituen tradisional dengan memberikan perhatian lebih dan meningkatkan intensitas silaturahmi tatap muka.⁹

Namun, strategi yang digunakan oleh DPC PPP di atas, strategi tersebut masih memberikan perolehan suara yang rendah terhadap hasil pemilihan umum legislatif pada tahun 2014 yaitu sebanyak 4,2%, sebelumnya pada tahun 2009 sebanyak 4,8% dan tahun 2004 sebanyak 12%. Tentunya dalam hal ini DPC Partai Persatuan Pembangunan belum menunjukkan peningkatan perolehan suara dalam pemilihan legislatif di Kota Padangsidempuan apabila dilihat dari tingginya perolehan suara partai lainnya.¹⁰

Tentunya ada masalah yang terjadi, dari tidak adanya loncatan peningkatan suara Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilihan legislatif di Kota Padangsidempuan. Padahal mestinya jumlah suara partai Islam tinggi dilihat dari mayoritas 84,37% masyarakat Kota Padangsidempuan adalah muslim.¹¹ Berdasarkan latar belakang dengan ini peneliti tertarik mengangkat judul penelitian mengenai permasalahan **“Strategi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan**

⁹Wawancara dengan Sekretaris PPP Kota Padangsidempuan Kadir Pandapotan.

¹⁰Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, Model-EB.

¹¹Badan Pusat Statistik (BPK) Kota Padangsidempuan, tentang Jumlah Penduduk Muslim Di Kota Padangsidempuan.

Pembangunan (PPP) Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Padangsidempuan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyusunan Strategi yang digunakan DPC PPP Kota Padangsidempuan dalam meraih suara pada pemilihan legislatif di Kota Padangsidempuan ?
2. Bagaimana Penerapan Strategi DPC PPP Kota Padangsidempuan dalam Pemilihan Legislatif di Kota Padangsidempuan ?
3. Apa saja kelemahan dan kelebihan DPC PPP Kota Padangsidempuan Untuk meraih suara dalam pemilihan legislatif di Kota Padangsidempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan strategi yang digunakan DPC PPP dalam meraih suara pada pemilihan legislatif di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi yang digunakan oleh DPC PPP dalam meraih suara pada pemilihan legislatif di Kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui apa saja kelemahan dan kelebihan dari DPC PPP dalam meraih suara dalam pemilihan legislatif di Kota Padangsidempuan.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Bagi peneliti, hasil ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa tambahan dan wawasan bagi peneliti terkait dengan masalah yang diteliti secara teori atau praktek dan untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara .
2. Bagi pembaca, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi kalangan peneliti khususnya mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang berminat untuk melakukan penelitian yang sama atau kearah yang lebih luas.
3. Bagi DPC PPP, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada DPC PPP yang menggunakan strategi-strategi dalam pencapaian sesuatu. Serta menjadikannya sebagai bahan evaluasi bagi DPC PPP Kota Padangsidimpuan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pengumpulan data gambaran secara ringkas mengenai proposal ini, maka sistem penulisannya akan dibagi kedalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang memuat tentang landasan teori yang terdiri dari kerangka teori, kerangka pikir.

Bab III merupakan bab yang memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan penelitian terdahulu.

Bab IV merupakan bab yang memuat tentang hasil penelitian mengenai bagaimana Strategi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Legislatif di Kota Padangsidempuan.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dari bab-bab yang dibahas sebelumnya dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategia*, yang diartikan *art and science of directing military forces*, seni atau ilmu tentang mengatur dan mengarahkan kekuatan militer. Dengan kata lain *strategia* atau *strategos* berarti seni menjadi seorang jenderal atau panglima perang. Strategi dimaknai sebagai cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan strategi adalah rencana cermat untuk suatu kegiatan.² Strategi menurut A. Halim merupakan suatu cara dimana lembaga atau organisasi akan mencapai suatu tujuannya sesuai peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal.³

Menurut Arnold Steinberg strategi adalah rencana untuk tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi keberhasilan strategi itu sendiri. Menurut Peter Schroder, untuk dapat menyerang lawan, maka strategi lawan tersebut harus dikenali terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengenalan atas

¹<http://kompasiana.com/strategi-pemenangan-partai-dalam-kontestasi-pemilu-2014>, diakses pada tanggal 19/03/2018, pukul 22:00 WIB.

²Kamus Baku Dasar Bahasa Indonesia, (Solo: C. V Aneka, 1993), hlm. 126.

³Toni Adrianus Pito, *Adrianus Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi*, (Bandung: Penerbit Nusantara, 2006), 196.

pihak lawan sangatlah penting. Jika tidak, kita tidak akan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan. Penyerangan strategi lawan berarti secara terus menerus mengganggu jalannya pelaksanaan strategi lawan, sehingga lawan tidak dapat merealisasikan strateginya.

Menurut Peter Schoder dalam Nielma Farida Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintahan. Sementara itu menurut Prihatmoko dalam Inda Nur Aminah menjelaskan, bahwa strategi sebagai seni yang melibatkan kemampuan inteligensi atau pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien.⁴

Artinya strategi menghasilkan gagasan dan konsepsi yang dikembangkan oleh para praktisi. Strategi politik adalah segala rencana dan tindakan untuk memperoleh kemenangan dan meraih kursi dalam pemilu. Strategi partai untuk memenangkan calon yang diusung sangatlah penting diakomodir sedemikian baik karna dari strategi inilah dapat dilihat kesuksesan dari suatu partai.

⁴Dwi Noviani, "Strategi Politik PPP dalam Memenangkan Calon Legislatif Perempuan Menghadapi Pemilihan Umum 2014 di Kota Tanjungpinang" skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang: 2015.

2. Konseptualisasi Partai Politik

a. Defenisi Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Pengertian partai politik menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Republik Indonesia dinyatakan bahwa, partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.⁵

Menurut Sigmund Neuman partai politik adalah organisasi artikulasi dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapat dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Huszar dan Stevenson, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan atau mendudukkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan.

⁵Lihat Undang-Undang No.31 Tahun 2002 Republik Indonesia.

Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan ini memberikan kepada anggota partainya manfaat yang bersifat ideal maupun materil. Dari beberapa defenisi partai politik dapat disimpulkan, bahwa partai politik merupakan suatu wadah yang terorganisir yang dapat dijadikan sebagai cita-cita bersama serta kesamaan kehendak untuk mempertahankan kekuasaan melalui jalur pemilihan umum dalam mewujudkan program-program yang sudah mereka susun. Adapun prinsip dasar dari partai politik, yakni:

- 1) Partai sebagai koalisi, yakni membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas.
- 2) Partai sebagai organisasi, untuk menjadi institusi yang eksis, dinamis dan berkelanjutan partai politik harus dikelola.
- 3) Partai sebagai pembuat kebijakan.

Partai politik mulai dikenal dalam bentuk yang moderen di Eropa dan Amerika Serikat sekitar abad ke-19 bersamaan mulai dikenalkan sistem pemilihan dan parlementaria. Sepanjang perkembangan dan kemajuan sistem pemilihan dan parlemen ini, maka berkembang pula sistem kepartaian politik. Istilah partai politik yang melekat pada partai politik dipergunakan untuk setiap bentuk kelompok organisasi yang bertujuan untuk memperoleh

kekuasaan politik, baik melalui pemilihan yang demokratis maupun melalui revolusi.⁶

Politik selalu menyangkut kepada tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang, lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang seorang. Menurut Prof. Miriam Budiardjo, unsur-unsur politik terdiri dari:

- a) Negara (*state*)
- b) Kekuasaan (*power*)
- c) Pengambilan keputusan (*decision making*)
- d) Kebijakan (*policy*)
- e) Pembagian (*distribution*).⁷

Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Suatu partai politik dibentuk tidak lain kecuali untuk berfungsi menjalankan kekuasaan politik. Dapat diketahui bahwa partai politik dengan

⁶Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 61.

⁷Eddy Kurniadi, *Peranan Pemuda dalam Pembangunan Politik di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 4.

kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Justru partai politik diadakan tidak lain kecuali untuk mencapai kekuasaan baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Kekuasaan itu hakikatnya berasal dari rakyat, dan sarana rakyat untuk mewujudkan kekuasaannya melalui partai politik.⁸

b. Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.⁹ Adapun partai politik juga memiliki sejumlah fungsi lain, yaitu:

1. Sosialisasi Politik

Yang dimaksud dengan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

⁸Miftah Toha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 97.

⁹Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 148.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga Negara biasa mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu.

4. Pemadu Kepentingan

Untuk memadukan kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan, maka partai politik dibentuk. Kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai alternative kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

5. Komunikator Politik

Partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik di Negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.

6. Penegendalian Konflik

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang

berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

7. Kontrol Politik

Dalam melaksanakan fungsi kontrol politik, partai politik juga harus menggunakan tolak ukur tersebut sebab tolak ukur itu pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama.¹⁰

c. Tujuan Partai Politik

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2008 pasal 10 dinyatakan bahwa tujuan partai politik adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI.
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khusus dari partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam

¹⁰*Ibid*, hlm. 149-154.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta tujuan terakhirnya membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹¹

3. Strategi Parpol Dalam Meraih Suara

a. Komunikasi Politik

1) Defenisi Komunikasi Politik

Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yakni *communico* yang artinya membagi, dan *comunis* yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.

Komunikasi politik menurut Dahlan ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Dengan demikian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Astrid S. Soesanto mendefenisikan komunikasi politik yaitu komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian

¹¹Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tujuan Partai Politik Pasal 10.

rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.¹²

Dengan demikian Komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik.

2) Strategi Komunikasi Politik

Strategi komunikasi politik merupakan tentang bagaimana proses komunikasi yang terjadi di dalam satu pertarungan politik oleh partai politik, atau secara langsung oleh seorang calon legislatif atau calon pimpinan daerah yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya di tengah masyarakat sebagai konstituennya.

Strategi komunikasi politik adalah rencana yang meliputi metode, teknik dan tata hubungan fungsional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi guna kegiatan operasional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi guna kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan dari penyusunan strategi adalah untuk menentukan langkah dalam melakukan tindakan. Langkah yang dilakukan dalam strategi merupakan implementasi dari misi yang dibawa. Dapat disimpulkan, bahwa

¹² Christianto Pontoh, "Strategi Kampanye Pemenangan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Dalam Jurnal Acta Diurna Volume IV. No. 1. Tahun 2015.

instrumen yang digunakan sebagai strategi dalam memenangkan calon legislatif (caleg) salah satunya adalah melalui komunikasi. Komunikasi politik mempunyai peranan yang penting dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada khalayak luas, karena merupakan tolak ukur keberhasilan bagi para politisi atau institusi politik.¹³

Proses komunikasi politik sama dengan proses komunikasi pada umumnya (komunikasi bermedia atau komunikasi tatap muka) komunikasi politik sebagai *body of knowledge* juga terdiri atas berbagai unsur, yakni:

1. Komunikator Politik

Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, sumber atau komunikator politik adalah mereka-mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik, misalnya Presiden, Menteri, DPR, KPU, Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD, Politisi, fungsionaris partai politik, fungsionaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan.

¹³Zein Abdullah, *Strategi Komunikasi Politik dan Penerapannya*, (Bandung: Simbiosis, 2008), hlm. 99.

2. Pesan Politik

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, pernyataan politik, artikel atau isi buku/brosur dan berita surat kabar, radio televisi dan internet yang berisi ulasan politik dan pemerintahan, puisi politik, spanduk atau baliho, iklan politik, propaganda, perang urat syaraf (*psywar*), makna logo, warna baju atau bendera, bahasa badan, dan semacamnya.

3. Saluran atau media politik

Saluran atau media politik adalah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya *media cetak*, yaitu surat kabar, tabloid, majalah, buku. *Media elektronik*. Misalnya film, radio, televisi, video, komputer, internet. *Media format kecil*, misalnya leaflet, brosur, selebaran, stiker, bulletin. *Media luar ruang (out door media)*, misalnya baliho, spanduk, reklame, bendera, pin, logo, rompi, kaos oblong, iklan mobil, kalender dan segala sesuatunya yang bisa digunakan untuk membangun citra (*image building*).

4. Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam Pemilihan Umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, ibu rumah tangga, mahasiswa, petani yang berhak memilih maupun pelajar dan siswa yang akan memilih setelah cukup usia.

5. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, dimana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara dalam pemilu. Pemberian suara ini sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai tingkat Presiden, DPR, MPR, Gubernur, Walikota/Bupati sampai tingkat DPRD.¹⁴

3) Fungsi Komunikasi Politik

McNair memiliki lima fungsi dasar dalam melaksanakan komunikasi politiknya, yakni sebagai berikut:¹⁵

- a) Memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi disekitarnya.

Di sini media komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan juga fungsi monitoring apa yang terjadi dalam masyarakat.

¹⁴Hafied Cangara, *Komunikasi Politik (Konsep, Teori, dan Strategi)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 37-39.

¹⁵*Ibid.*, hlm.40.

- b) Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Di sini para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada sehingga berusaha membuat liputan yang objektif yang bisa mendidik masyarakat atas realitas fakta tersebut.
- c) Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian, bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi.
- d) Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik.
- e) Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa.

4) Tahapan Startegi Komunikasi Politik

Menciptakan keteraturan dan kejelasan arah merupakan fungsi utama dari strategi komunikasi politik. Dan fungsi ini merupakan tahap dari strategi komunikasi politik agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya. Adapun beberapa tahapan perencanaan strategi komunikasi politik yang di gagas oleh Gregory, diantaranya:

a. Analisis masalah

Langkah awal dalam strategi komunikasi politik adalah menganalisis masalah. Dalam analisis masalah perlu adanya identifikasi

yang jelas, agar dapat melakukan identifikasi dengan jelas, maka analisis masalah harus dilakukan secara sistematis atau terstruktur. Dalam analisis masalah terdapat pengumpulan informasi yang berhubungan dengan permasalahan dan harus dilakukan secara objektif dan tertulis dan perlu ditinjau secara berkala setiap waktu.

b. Menyusun Tujuan (*Planning*)

Tujuan yang disusun haruslah bersifat logis dan realistis alias tidak terlihat kalau dibuat-buat. Penyusunan tujuan ini juga merupakan salah satu elemen dalam proses perencanaan pada suatu komunikasi politik.

c. Segmentasi dan identifikasi sasaran atau target

Jika sasaran atau target disegmentasi dan diidentifikasi, maka proses perencanaan ke depannya dapat dijalankan lebih mudah dan tepat sasaran atau sesuai dengan *planning*.

d. Menentukan pesan

Menentukan pesan dalam perencanaan komunikasi politik merupakan sesuatu yang paling penting. Karena pesan komunikasi politik merupakan suatu sarana atau media yang akan membawa sasaran untuk mengikuti apa yang diinginkan penyampai pesan atau komunikator dari beberapa program komunikasi politik yang pada akhirnya sampai kepada perencanaan tujuan.

e. Membuat strategi dan taktik

Strategi atau lebih dikenal dengan istilah *guidingprinciple* yang merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang akan diterapkan dalam komunikasi politik. Sedangkan penentuan taktik ini sangat bergantung pada apa dan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dibidik oleh komunikator. Semakin jelas tujuan dan sasaran yang akan dibidik maka taktik yang digunakan harus semakin kreatif dan variatif. Disinilah sang komunikator dituntut untuk kreatif dalam memberikan pesan yang inovatif.

f. Alokasi dan sumber dana

Komunikasi politik tentunya dilakukan dalam waktu yang tidak menentu atau kapan saja. Bahkan ada kalanya waktu tersebut ditentukan oleh pihak luar partai, yaitu Panwaslu. Ada juga yang ditentukan sendiri oleh partai itu sendiri. Pengalokasian dana dan operasioanalnya ini didasari secara efektif dan efisien.

g. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan akhir atau tahapan setelah strategi dilaksanakan dan sangat berperan penting dalam perencanaan komunikasi politik. Karena nantinya hasil dari evaluasi ini akan

digunakan dalam melakukan strategi komunikasi politik berikutnya, sehingga evaluasi perlu dilakukan secara terstruktur dan sistematis.¹⁶

2. Kampanye Politik

1) Defenisi Kampanye Politik

Kampanye menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya); kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen untuk mendapat dukungan massa pemilih di suatu pemungutan suara.¹⁷ Kampanye adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terlembaga.

Rajasundaram mendefinisikan kampanye sebagai pemanfaatan berbagai metode komunikasi yang berbeda secara terkoordinasi dalam periode waktu tertentu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah tertentu berikut pemecahannya. Kampanye menurut Pfau dan Parrot adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.

Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan

¹⁶ <http://pakarkomunikasi.comStrategi-Komunikasi-Politik-Unsur-Tahapan>, di akses pada tanggal Mei 2018, pukul 22:45 WIB.

¹⁷ <http://kbbi.web.id-Kampanye>, di akses pada tanggal 23/05/2018, pukul 13:23 WIB.

pada kurun waktu tertentu. Dalam setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya harus mengandung empat hal yakni (1) tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu (2) jumlah khalayak sasaran yang besar (3) biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan (4) melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Kampanye pemilihan umum bertujuan mengubah atau memperkuat perilaku masyarakat dalam memilih kandidat atau partai politik tertentu. *Candidate-oriented campaignings* atau kampanye yang berorientasi pada kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Tujuan kampanye ini adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum.

2) Tahapan Kampanye Politik

Dalam *Candidate-oriented campaignings* atau kampanye meliputi beberapa tahap, antara lain:

a. Tahap identifikasi

Merupakan tahap penciptaan identitas kampanye agar dengan mudah dapat dikenali khalayak identitas dengan penggunaan simbol, warna, lagu, seragam atau slogan.

b. Tahap legitimasi

Dalam kampanye politik diperoleh ketika seseorang telah masuk dalam daftar kandidat anggota legislatif. Legitimasi mereka dianggap capabel dan tidak menyalahgunakan jabatan. Dalam kampanye produk, legitimasi ditunjukkan melalui testimoni atau pengakuan konsumen tentang keunggulan produk tertentu.

c. Tahap partisipasi

Tahap partisipasi ini bersifat nyata atau simbolik. Partisipasi nyata ditunjukkan oleh keterlibatan orang-orang dalam menyebarkan pamflet, brosur atau poster, menghadiri demonstrasi yang diselenggarakan sebuah lembaga swadaya masyarakat atau memberikan sumbangan untuk perjuangan partai.

d. Tahap penetrasi

Pada tahap ini seorang kandidat, sebuah prodek atau gagasan telah hadir dan mendapat tempat di hati masyarakat. Seorang juru kampanye telah berhasil menarik simpati masyarakat dan meyakinkan mereka bahwa ia adalah kandidat terbaik dari sekian yang ada.

e. Tahap distribusi

Tahap pembuktian, pada tahap ini tujuan kampanye pada umumnya telah tercapai. Kandidat politik telah mendapatkan kekuasaan yang mereka

cari, sebuah produk sudah dibeli masyarakat atau kampanye kenaikan harga tarif tol telah disetujui pemerintah.¹⁸

Model kampanye Nowak dan Warneryd terdapat tujuh elemen kampanye, antara lain:

- 1) *Intended effect* (efek yang diharapkan). Efek yang hendak dicapai harus dirumuskan dengan jelas.
- 2) *Competting communication* (persaingan komunikasi). Agar suatu kampanye menjadi efektif, maka perlu diperhitungkan potensi gangguan dari kampanye yang bertolak belakang (*counter campaigns*).
- 3) *Communication object* (objek komunikasi). Objek kampanye biasanya dipusatkan pada satu hal saja, karena untuk objek yang berbeda menghendaki metode komunikasi yang berbeda.
- 4) *Target population and receiving group* (populasi target dan kelompok penerima). Kelompok penerima adalah bagian dari populasi target.
- 5) *The channel* (saluran). Saluran yang digunakan dapat bermacam-macam tergantung karakteristik kelompok penerima dan jenis pesan kampanye.
- 6) *The message* (pesan). Pesan dapat dibentuk sesuai dengan karakteristik kelompok yang menerimanya. Pesan dibagi 3 fungsi: menumbuhkan kesadaran, mempengaruhi serta memperteguh dan meyakinkan penerima pesan bahwa pilihan atau tindakan mereka adalah benar.

¹⁸ Bono Setyo, "Membangun Model Kampanye Politik Berbasis Silaturahmi Bagi Calon Legislatif Incumbent Kabupaten Klaten Dalam Pemilu 2014", vol. 06. No. 2, Oktober 2013.

- 7) *The communicator / sender* (komunikator/pengirim pesan). Komunikator dapat dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya seorang ahli atau seorang yang dipercaya khalayak, atau malah seseorang yang memiliki kedua sifat tersebut.
- 8) *The obtained* (efek yang dicapai). Efek kampanye meliputi efek kognitif (perhatian, peningkatan pengetahuan dan kesadaran), efektif (berhubungan dengan perasaan, mood dan sikap) dan konatif (keputusan bertindak dan penerapan).¹⁹

4. Pemilihan Umum Legislatif

a. Defenisi Pemilu

Pemilihan umum diartikan sebagai proses, cara perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara. Berdasarkan hal tersebut, gabungan dari kata “sistem” dan “pemilihan umum” secara bahasa merupakan perangkat beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain yang terdapat dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat suatu negara.

Pemilihan umum yang disebut pemilu menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung,

¹⁹ Jalaluddin Rakhmat, *Manajemen Kampanye*, (Bandung: Simbiosis, 2004), hlm. 23-24.

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945.²⁰

Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu, Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu Pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.²¹

Sigit Pamungkas mendefinisikan sistem pemilihan umum sebagai perangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam satu lembaga perwakilan. Dengan demikian, sistem pemilihan umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.²²

Sedangkan Dieter Nohlen mendefenisikan sistem pemilihan umum dalam dua pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah cara dengan mana pemilih dapat mengeksperesikan pilihan politiknya

²⁰Salinan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas perubahan UU No 10 Tahun 2008, Ketentuan Umum BAB 1 ayat 1.

²¹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara In donesia*,(Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum UI, 1983), hlm. 329.

²²*Ibid.*, hlm. 51.

melalui pemberian suara, dimana dengan suara tersebut dapat memperoleh kursi di parlemen atau pejabat publik.²³

Ibnu Tricahyo mendefenisikan pemilihan umum dari sudut pandang yang lebih abstrak dengan melihat pemilihan umum tidak hanya sekedar teknis, melainkan ada nilai filosofisnya. Ibnu menyatakan, bahwa pemilihan umum merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Lances Castles mendefenisikan pemilihan umum sebagai sarana tak terpisahkan dari kehidupan politik negara demokratis moderen.

Ben Reilly sebagaimana dikutip Joko J. Prihatmoko mengatakan pemilihan umum pada intinya sistem pemilihan yang dirancang untuk memenuhi tiga hal, di mana ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Ketiga hal yang dimaksud adalah:

- 1) Menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum menjadi kursi di badan-badan legislatif.
- 2) Sistem pemilihan bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji wakil-wakil yang telah mereka pilih.

²³*Ibid.*, hlm. 52.

- 3) Memberikan insentif kepada mereka yang memperebutkan kekuasaan untuk menyusun imbauan kepada para pemilihan dengan cara bebeda-beda.

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya ada tiga kata kunci tentang sistem pemilihan umum, yaitu:

- a) Menyangkut konversi suara menjadi kursi lembaga perwakilan.
- b) Menyangkut masalah pemetaan kepentingan masyarakat.
- c) Menyangkut keberadaan partai politik.²⁴

b. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan umum sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandate rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun kedepan. Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka Pemilu bertujuan antara lain:

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara aman dan tertib.
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
3. Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga negara.²⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilu itu ada empat, yaitu:

²⁴*Ibid.*, hlm. 54.

²⁵ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum UI, 1983), hlm. 329.

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti sebagaimana dikutip Joko J. Prihatmoko, tujuan pelaksanaan pemilu sebagai berikut: pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternative kebijakan umum (*public policy*). Orang yang akan menjadi wakil rakyat tidaklah bias dari sembarangan orang, dalam arti bahwa wakil rakyat mestilah orang-orang yang memiliki moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai serta memiliki otoritas ekonomi dan otoritas cultural.

Kedua, pemilu merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integritas atau kesatuan masyarakat terjamin.

Ketiga, pemilu merupakan mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal ini sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak teralienasi dalam proses pengambilan kebijakan (*decision making*) negara.

Tujuan pemilihan umum menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 3 adalah pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten atau Kota.²⁶

Adapun ayat yang menjelaskan tentang memilih kepemimpinan dalam Islam terdapat dalam Q.S Al-Maidah: 51.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu), sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim. (Q.S Al-Maidah 5: 51).²⁷

Tafsir ayat ini adalah jika keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani atau siapapun seperti dilukiskan ayat-ayat yang lalu, yakni lebih suka mengikuti hukum Jahiliah dan mengabaikan hukum Allah, bahkan bermaksud memalingkan kaum muslimin dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah. Serta siapapun yang bersifat seperti sifat mereka yang dikecam ini, jangan mengambil mereka sebagai auliya, yakni orang-orang dekat. Sifat mereka sama dalam kekufuran dan dalam kebencian kepada kamu, karena itu wajar

²⁶Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 3.

²⁷ Departemen Agama Negeri, *Al-quran dan Tejemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-Art), hlm. 118.

jika sebagian mereka adalah auliya, yakni penolong bagi sebagian yang lain dalam menghadapi kamu karena kepentingan mereka dalam hal ini sama walau agama dan keyakinan mereka satu sama lain berbeda, yakni tidak menunjuki dan tidak mengantar kepada orang-orang yang zalim menuju jalan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.²⁸

Berdasarkan ayat di atas, dapat dijelaskan janganlah mengangkat mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, karena mereka hanya mementingkan golongan mereka, golongan Yahudi dengan Yahudi begitu juga golongan Nasrani dengan Nasrani. Allah sangat jelas melarang orang Yahudi dan Nasrani dijadikan sebagai orang dekat apalagi menjadi pemimpin. Allah tidak akan memberi petunjuk bagi manusia yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا
 أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ubaidullah Telah menceritakan kepada Nafi dari Abdullah radliallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan, adapun jika

²⁸ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 149.

ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati.²⁹

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَمْرُو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْهَلِ
عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ صَلَاتِنَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا
إِمَامَكُمْ وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ وَيَرِثَ دِيَارَكُمْ شِرَارُكُمْ

Artinya: Sulaiman menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, Amru dan Abdullah bin Abdur Rahman Al Asyhal dari Hudzaifah bin Al Yaman bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda: Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian membunuh pemimpin kalian, pedang-pedang kalian banyak sekali meminum darah, dan agama kalian diwarisi (dikuasai) oleh orang-orang yang paling buruk di antara kalian.³⁰

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

Dalam fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadh'iyah*). Dengan demikian legislasi dalam Islam adalah kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan

²⁹ Sumber : Bukhari, Kitab : Hukum-hukum, Bab : Mendengar dan taat bagi imam selama tidak untuk kemaksiatan, No. Hadist : 6611.

³⁰ Sumber : Ahmad, Kitab : Sisa musnad sahabat Anshar, Bab : Hadits Hudzaifah bin Yaman dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, No. Hadist : 22213.

dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT.³¹

Dalam konsep *trias politica* fungsi lembaga legislatif adalah membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila legislatif dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.³²

Fungsi legislatif di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipegang oleh Presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Fungsi lembaga legislatif juga dapat dilihat di dalam pasal 20 A UUD 1945 ayat 1 yang memiliki fungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang selanjutnya dalam ayat 2 dan 3 adapun hak dari legislatif, yaitu interpelsi, angket, dan menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Untuk sahnya suatu undang-undang harus ada persetujuan presiden seperti yang ditetapkan di dalam pasal 21 ayat 2.³³

³¹Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001), hlm. 161.

³²Kaka Alvian Nasution, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, (Jakarta: Saufa, 2014), hlm. 53.

³³Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 8.

DPRD dibentuk, baik di daerah provinsi maupun di daerah Kabupaten atau Kota. DPRD disebut sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif di daerah. Akan tetapi, harus dicatat bahwa fungsi legislatif di daerah tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR dalam hubungannya dengan Presiden, yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 Hasil Amandemen. Dalam Pasal ini ditetapkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU dan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Sedangkan kewenangan menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati atau Walikota dengan persetujuan DPRD. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati atau Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Mochammad Rifqi Ridho dengan judul “Strategi Komunikasi Politik Dalam Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Pemilihan Legislatif 2009 di Kabupaten Tegal”.

³⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat danKepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 396-297.

2. Penelitian Bono Setyo dengan judul “Membangun Model Kampanye Politik Berbasis Silaturahmi Bagi Calon Legislatif *Incumbent* Kabupaten Klaten Dalam Pemilu 2014”.
3. Penelitian Dwi Noviani dengan judul “Strategi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Memenangkan Caleg Perempuan Menghadapi Pemilu 2014 di Kota Tanjungpinang”.

Adapun analisis dari peneliti terhadap penelitian terdahulu, yaitu yang menyamakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang pertama ialah membahas mengenai pemilihan umum legislatif, sedangkan yang membedakannya ialah fokus pada penelitian ini ialah bagaimana model kampanye politik berbasis silaturahmi.

Model kampanye politik caleg meliputi: tahap identifikasi, tahap legitimasi, partisipasi, penetrasi, dan distribusi. Model kampanye politik caleg berbasis silaturahmi antara lain melalui, saluran komunikasi publik, saluran komunikasi sosial, saluran komunikasi antar pribadi, dan silaturahmi komunikasi tradisional.

Sedangkan persamaan dalam penelitian terdahulu kedua sama-sama membahas PPP dalam pemilu legislatif, sedangkan yang membedakannya fokus masalahnya ialah strategi untuk calon legislatif perempuan di Kota Tanjungpinang. PPP Kota Tanjungpinang sangat mendukung keterlibatan perempuan di lembaga legislatif dan program kesetaraan gender harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, sedangkan strategi yang

digunakan teori strategi memenagkan pemilu Adman Nursal yang terdiri dari sembilan elemen yaitu: *possitioning, policy, person, party, presentasion, push marketing, pull marketing, passmarketing dan polling*. Penelitian terdahulu yang terakhir Persamaannya sama-sama melakukan penelitian di bidang partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan perbedaannya adalah peneliti Mochammmad Ridho Rifqi memfokuskan pada strategi komunikasi partai politik.

Strategi komunikasi yang digunakan partai PPP di Kabupaten Tegal pada pemilu 2009 ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal dikarenakan masih terdapat kelemahan-kelemahan dari strategi komunikasi politik itu sendiri, oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinya penurunan jumlah suara evaluasi yang dilakukan oleh PPP Kabupaten Tegal adalah dengan cara merekrut para mantan kades yang pada pemilu 2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Jenis Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Padangsidempuan, yang berlokasi di Jl. MT Haryono No. 53, Bincar, Padangsidempuan Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian atau penelitian lapangan dimana dalam memperoleh data-data peneliti langsung melakukan wawancara mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat, didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, memo, dekontentasi resmi atau bukan dan sebagainya).²

Adapun penelitian yang akan dilaksanakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu strategi apa saja yang digunakan DPC PPP dalam meraih suara pada pemilihan legislatif di Kota Padangsidempuan.

¹Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7.

²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 93.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek yang akan diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam penelitian.³ Adapun objek penelitian ini adalah kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kota Padangsidempuan.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik yaitu *snowball sampling* mendapatkan informan dengan cara berantai. *Snowball Sampling* ini dilakukan oleh peneliti untuk menggali informasi dari anggota DPC Partai Persatuan Pembangunan di Kota Padangsidempuan untuk diwawancarai kemudian dari informan tersebut dicari (digali) keterangan mengenai strategi yang digunakan DPC PPP dalam meraih suara pada pemilihan legislatif di kota Padangsidempuan. Informan yang didapatkan harus secara langsung untuk memperoleh data yang lebih akurat.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder, adapun data yang dimaksud data primer dan data sekunder sebagai berikut:⁵

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan

³Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

⁴Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166.

⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125.

yaitu sumber data yang diperoleh dari kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan di Kota Padangsidimpuan.

2. Data sekunder, yaitu data yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, dalam hal ini undang-undang pemilihan umum.
 - b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.⁶
 - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang diambil dari kamus, surat kabar, internet, journal, dan bahan hukum yang relevan dengan penelitian tersebut. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari data pribadi, buku harian, data tersier adalah data pelengkap sebagai pendukung di dalam penelitian ini dan juga diambil dari yang berhubungan dengan topik yang diteliti sebagai awal sebelum terjun kelapangan.

⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 115.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁷ Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Jenis observasi ini tidak melibatkan diri kedalam observasi hanya pengamatan di lakukan secara pantas pada saat tertentu kegiatan observasinya.⁸

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap sumber data, wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, yang mana wawancara merupakan kontak langsung atau tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.⁹ Adapun yang diwawancarai adalah pihak yang ada di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kota Padangsidempuan, kader-kader partai.

⁷Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

⁸P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasadya, 2004), hlm.66.

⁹*Ibid.*, hlm. 165.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah usaha mengumpulkan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan serta monografi kantor DPC PPP serta strategi perolehan suara partai PPP yang terdapat dalam agenda maupun arsip yang ada dilokasi tersebut.

E. Analisis Data

Analisis data menurut Lexy J Moleong bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam penelitian.¹⁰ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, setelah dipelajari dan ditelaah secara mendalam maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian di analisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian.

Analisis data yang deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis strategiDDPC PPP dalam meraih suara pada pemilihan legislatif di Kota

¹⁰Lexy J Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 175-178.

Padangsidimpuan. Teknik analisis data secara kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara. Tehnik yang biasa dihubungkan dengan metode kualitatif.¹¹

¹¹Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP yang mampu mempersatukan empat partai umat Islam. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan tempat perjuangan umat Islam dan wahana pembangunan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan nilai-nilai Islam yang *Rahmatan Lil'Aalamiin*.

Berdasarkan Pasal 1 dalam Anggaran Rumah Tangga lambang PPP adalah gambar Ka'bah yang berarti pemersatu umat Islam. Ka'bah bagi PPP adalah simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan.

Lambang PPP adalah gambar Ka'bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk, bertirai warna kuning emas, dan tampak di sisi kiri Hajar Aswad yang berada di sudut dinding tepat. Di bawah gambar Ka'bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan.

Tulisan PPP berada di atas warna dasar hijau dalam bingkai segi 4 (empat) sama sisi berwarna kuning emas.¹

2. Ideologi Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpendapat bahwa Islam sebagai syari'at terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia di bumi adalah kebenaran mutlak yang bersifat *universal*. PPP memandang bahwa, paham keagamaan yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia adalah paham keagamaan Ahlussunah wal jama'ah (paham keagamaan yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta salaf as-sholeh). Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa seluruh pemikiran, sikap, dan kebijakan partai maupun kader-kadernya bersumber dari ajaran Islam, internalisasi nilai-nilai ideologi harus menjadi warna, corak dan *Shibghah* (identitas) partai yang melambangkan keluhuran dari ajaran Islam.

3. Visi Dan Misi Partai Persatuan Pembangunan

Visi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta keadilan sosial berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.²

¹ Hasil Ketetapan Muktamar VIII PPP Tentang Anggaran Rumah Tangga Pasal 1.

² Laporan pertanggung jawaban Pengurus harian DPC PPP Kota Padangsidempuan, hlm. 3.

Misi Partai Persatuan Pembangunan meliputi:

1. PPP berkhidmat untuk berjuang mewujudkan dan membina manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim).
2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia).
3. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa).
4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.³

³ *Ibid.*, hlm. 4.

4. Profil DPC PPP Kota Padangsidempuan

Struktur organisasi kepemimpinan PPP sesuai dengan pasal 12 AD ART PPP adalah organisasi tingkat nasional dipimpin oleh dewan pusat Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPP PPP, organisasi tingkat provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPW PPP, organisasi tingkat kabupaten atau kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya disingkat dengan DPC PPP, Organisasi tingkat kecamatan dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan yang kemudian disingkat dengan PAC PPP dan organisasi tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lainnya dipimpin oleh Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan.

PPP didirikan oleh lima deklaratator yang merupakan pimpinan empat partai Islam peserta pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan. Para deklaratator itu adalah KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nahdatul Ulama, H. Mohammmad Syafaat Mintaredja, SH ketua umum Partai Muslimin Indonesia, H. Anwar Tjokroaminoto, ketua umum PSII, H. Rusli Halil ketua umum partai Islam Perti dan H. Masykur, Ketua kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

Sedangkan DPC PPP Kota Padangsidempuan berdiri setelah terjadi pemekaran Tahun 2001 diresmikan langsung oleh Mendagri. Semenjak itu pemekaran menjadi Kota terbentuklah DPC PPP yang diketuai oleh Bulkayni

Nasution yang berlokasi di Jl. MT Haryono Padangsidimpuan Selatan No. 53, Bincar.⁴

5. Prinsip Perjuangan DPC PPP Kota Padangsidimpuan

a. Prinsip Ibadah

PPP senantiasa berupaya berupaya mendasari perjuangannya dengan prinsip ibadah, dalam arti yang seluas-luasnya yaitu untuk mencapai keridhoan Allah SWT. Oleh karena itu, seluruh kegiatan berpolitik jajaran partai adalah merupakan keterpanggilan untuk beribadah.

b. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

PPP menyeru dan mendorong melaksanakan segala perbuatan yang tercela. Prinsip ini juga melandasi segala landasan perjuangan dalam melaksanakan fungsi untuk menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan atau kontrol sosial. Dengan prinsip ini partai berusaha mendorong budaya kritis dalam kehidupan masyarakat keseluruhan sehingga tidak terjadi political decay (pembusukan politik) yang mengakibatkan kemungkaran yang lebih jauh oleh sikap tatanan masyarakat secara keseluruhan.

c. Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan

Perjuangan PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan masyarakat. Perjuangan partai mengarah pada

⁴ Wawancara pribadi dengan Hasanuddin Sipahutar Pengurus Harian DPC PPP Kota Padangsidimpuan, 26 April 2018, pukul 15:37 WIB.

perlawanan terhadap kebatilan karena kebenaran yang mutlak hanya Allah SWT yang maha benar. Sementara itu, prinsip kejujuran atau amanah bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini perjuangan dalam bentuk apapun akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian, prinsip kejujuran merupakan penunaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga sehingga terhindar dari perbuatan yang mengkhianati amanah rakyat. PPP terus mempertahankan prinsip keadilan di dalam setiap gerak langkah perjuangannya. Tegaknya keadilan adalah esensial dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan prinsip keadilan maka segala aturan dapat terlaksana dan berjalan baik sehingga menimbulkan keharmonisan, keselarasan, ketentraman.

d. Prinsip Musyawarah

PPP berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai serta menumbuhkan tanggung jawab bersama sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Disamping itu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah SWT. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai mufakat maka tidak tertutup kemungkinan pengambilan keputusan ditempuh dengan suara terbanyak mencegah munculnya dictator mayoritas.

e. Prinsip persamaa, kebersamaan dan Persatuan

PPP mendasarkan perjuangan atas dasar prinsip persamaan derajat manusia dihadapan Allah SWT. Hal ini adalah keyakinan yang mendasar yang dapat memberikan motivasi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. PPP berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam memikul beban dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan secara proposional sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan dan dikucilkan.

f. Prinsip Istiqomah

PPP menjadikan prinsip istiqomah sebagai prinsip perjuangan. Artinya, PPP sebagai institusi dan kader-kadernya harus gigih, kokoh, teguh pendirian, dan selalu konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan nilai-nilai kebenaran.⁵

Disamping itu, prinsip yang mendasar pada PPP adalah nilai-nilai ajaran Islam yang merupakan ideologinya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sikap kebijakan yang akan dihadapi dalam memperoleh suatu keputusan. Serta ideologinya merupakan penanaman motivasi dan semangat serta internalisasi nilai-nilai perjuangan dalam pelaksanaan program-program partai disemua aspeknya.

⁵Hasil Ketetapan Muktamar VIII PPP Tentang Anggaran Dasar Pasal 4.

6. Struktur Kepengurusan DPC PPP Kota Padangsidempuan

Berdasarkan surat keputusan DPW PPP Sumatera Utara maka susunan personalia pengurus harian dewan pimpinan cabang, pimpinan majelis pertimbangan dewan pimpinan cabang, pimpinan majelis pakar dewan pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Padangsidempuan masa bakti 2017-2022.⁶

Tabel 1

Susunan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Padangsidempuan Masa Bakti 2017-2022

NAMA	JABATAN
Hasanuddin Sipahutar, S.Pd	Ketua
Sofyan Hadi	Wakil Ketua
Muhammad Ali Siregar, S.sos	Wakil Ketua
Muhammad H. Hasibuan	Wakil Ketua
Kadir Pandapotan Siregar, MA	Sekretaris
Zul Fadly	Wakil Sekretaris
Dedy Kurniawan Nasution, S.Pd	Wakil Sekretaris
Muhammad Tuasa Pane	Wakil Sekretaris
Mahrani Harahap, S. Sos	Bendahara
Rosdiana Siregar	Wakil Bendahara
Lena Yanti Hutagulung	Wakil Bendahara
Drs. Zuhannah Lubis	Wakil Bendahara

Sumber: Surat Keputusan DPW PPP Sumatera Utara

⁶ Wawancara dengan Hasanuddin Sipahutar S. Pd.

Tabel 2
Susunan Personalia Pengurus Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan
Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Padangsidempuan Masa Bakti 2017-
2022

NAMA	JABATAN
H. Bulkainy Nasution	Ketua
Muhammad Ikhsan Harahap	Wakil Ketua
Ustadz Syahdi Lubis	Wakil Ketua
Asbon Salim Tanjung	Wakil Ketua
Djulian Harahap	Sekretaris
Indarjok	Wakil Sekretaris
Imara Gumilar	Wakil Sekretaris

Sumber: Surat Keputusan DPW PPP Kota Padangsidempuan

Tabel 3
Susunan Personalia Pengurus Harian Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan
Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Padangsidempuan Masa Bakti 2017-
2022

NAMA	JABATAN
Syalendra Lubis	Ketua
Drs. H. Payungan Siregar	Wakil Ketua
Agus Harahap	Wakil Ketua
Irsan Haposan Lubis	Sekretaris
Arfansyah Harahap	Wakil Sekretaris
Rio Ananda Lubis	Wakil Sekretaris

Sumber: Surat Keputusan DPW PPP Kota Padangsidempuan

Tabel 4
Data Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota
Padangsidempuan

Kelompok Umur	Jenis Umur		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	11.161	11.263	22.524
5-9	11.258	10.700	21.958
10-14	11.093	10.811	21.904
15-19	11.691	12.498	24189
20-24	9.808	11.238	21.046
25-29	7.858	7.977	15.835
30-34	7.122	6.945	14.354
35-39	6.464	6.881	13.409
40-44	6.182	6.164	13.063
45-49	5.892	5.305	12.056
50-54	5.021	3.870	10.326
55-59	3.608	3.591	8.478
60-64	2.161	2.732	3.031
65-69	1.299	1.299	1.732
70-74	824	824	1.176
75+	624	624	1.229
Jumlah	100.642	105.854	206.496

Menurut data statistik yang terakhir di kota Padangsidempuan diketahui jumlah penduduk 206.496 jiwa yang.⁷ Jika dilihat dari faktor jenis kelamin, maka penduduk kota padang sidempuan terdiri dari 100.642 jiwa laki-laki dan 105.854 jiwa perempuan. Dengan demikian Komposisi penduduk Kota Padangsidempuan hampir seimbang antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan.

Tabel 5

Data jumlah Pemilih 2014 Berdasarkan Kecamatan di Kota Padangsidempuan

No	Uraian	Rincian Perolehan Suara							
			PSP Utara	PSP Selatan	PSP Batunadua	PSP Hutaim baru	PSP Tenggara	PSP Angkola	Jumlah Akhir
I.	Data Pemilih	Lk	20,177	22,136	21,944	5,579	10,594	2,850	68,142
		Pr	22,136	23,770	6,979	5924	11,903	2,943	73,655
		Jml	42,313	45,714	13,977	11,503	22,497	5,793	141,797
	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT)	Lk	20,177	22,136	21,944	5,579	10,594	2,850	68,142
		Pr	22,136	23,770	6,979	5924	11,903	2,943	73,655
		Jml	42,313	45,714	13,977	11,503	22,497	5,793	141,797
	Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)	Lk	43	85	8	10	2	0	148
		Pr	45	49	10	2	1	0	153
		Jml	88	180	18	12	3	0	301
	Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Lk	646	905	168	128	273	20	2,140
		Pr	672	920	275	181	235	19	2,302
		Jml	1,318	1,825	443	309	508	39	4,442
	Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) Pengguna Ktp dan	Lk	556	743	123	55	155	28	1,660
		Pr	687	975	195	90	152	42	2,241
		Jml	1,243	1,718	318	145	407	70	3,901

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan.

	KK/Nama Sejenis lainnya								
	Jumlah Pemilih (1,2,3,4)	Lk	21,422	23,677	7,297	5,772	11,024	2,898	72,090
		Pr	23,540	25,760	7,459	6,197	12,391	3,004	78,351
		Jml	44,962	49,437	14,756	11,969	23,415	5,902	150,441

Dari tabel diatas menunjukkan dengan jelas yaitu data jumlah penduduk berdasarkan kecamatan yaitu berdasarkan jumlah pemilih terdaftar yaitu sekitar 141,797. Sedangkan, jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih daftar tambahan yaitu 301, dan dari Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK) yaitu 4,442. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) pengguna KTP dan KK Nama Sejenis lainnya 3,901. Jumlah Pemilih 1,2,3,4 yaitu 150,441.⁸

B. Hasil Penelitian

1. Penyusunan Strategi PPP Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan legislatif Di Kota Padangsidempuan

Strategi merupakan perencanaan yang cermat yang disusun dan dilaksanakan tim sukses yang memiliki tujuan mencapai kemenangan atas sasaran yang ditentukan dalam pemilu. Sasaran merupakan apa yang ingin dicapai oleh tim kampanye, dalam hal ini adalah target dukungan pemilihan yang diwujudkan dalam pemberian suara kepada partai tersebut.

Adapun penyusunan strategi yang dilakukan DPC PPP dalam memenangkan calon legislatif di Kota Padangsidempuan adalah melalui hasil diskusi dan analisis bersama atau yang dikenal dengan rakerwil (rapat kerja wilayah) dengan PAC dan Pimpinan Ranting.

⁸ Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan

Setelah dilakukannya pembagian tugas, barulah kemudian dibentuk tim pemenang. Dimana setiap tim sukses dari DPC PPP haruslah mempunyai mata dan telinga yang berada disetiap kampung, yaitu Pokja, Pokja adalah kelompok kerja di setiap kampung dan bertugas untuk menggali informasi dari masyarakat, setelah informasi diperoleh maka dilaporkan kepada DPC PPP. Proses penyusunan strategi DPC PPP dalam meraih suara pada pemilihan caleg di Kota Padangsidimpuan yaitu:

1. Mengusung caleg yang memang berkompeten dan menarik.
2. Melakukan pemetaan wilayah, personil, dan anggaran.
3. Membentuk tim sukses.
4. Menyusun konsep kampanye.
5. Mempersiapkan program kerja yang akan ditawarkan kepada masyarakat.
6. Membuat jadwal rencana kunjungan ke masyarakat.⁹

Hal ini diungkapkan oleh Dedy Kurniawan S. Pd kepada peneliti:

“ Kaderisasi merupakan salah satu komponen yang paling penting, PPP melakukan kaderisasi dengan sistem dialog dan diskusi, dengan tema bahasan yaitu, keislaman, segala yang berkaitan dengan PPP dan kepemiluan, akan tetapi yang menjadi persoalan kaderisasi bukanlah terletak dari sistemnya melainkan kepada kader-kader yang belum sepenuhnya mengaplikasikan konsepnya. Dalam penyusunan strategi perlu adanya pemetaan yang terdiri dari Pemula, pemilih dan orang tua. Kita PPP melakukan penyusunan konsep apa yang akan digunakan dalam kampanye, apakah kampanye yang terbuka yang langsung mengumpulkan massa dan berorasi didepannya atau malah dengan kampanye tertutup yang mana langsung menemui masyarakat dan melihat apa yang mereka butuhkan tanpa ada perantara. Serta perlu

⁹ Wawancara dengan Kadir Pandapotan MA.

adanya penyampaian pesan program-program yang akan diaplikasikan”.¹⁰

Hal ini juga diungkapkan oleh Muhammad Ali Siregar S. Sos:

“ Dalam hal ini PPP menggunakan metode segmentasi pemilih, pemilih dapat dibedakan dari kalangan pemula, pemilih dan orang tua, atau dengan kata lain kita dapat membedakannya berdasarkan usianya dimana tujuannya untuk membantu dalam analisis atas persaingan politik dengan melihat dari segmen yang bersangkutan dalam menghitung probabilitas untuk menang, membantu mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, serta membantu kita untuk mengembangkan program-program agar tepat sasaran, ya kalo dilihat cara pola berfikir orang yang berbeda-beda maka perlu dilakukannya segmentasi”.¹¹

Penyusunan Strategi DPC PPP Kota Padangsidimpuan dalam meraih suara pada pemilihan legislatif adalah sebuah bentuk ikhtiar untuk menjaga performa komunikatif mereka dan menjaga eksistensinya sebagai organisasi politik, dan diharapkan dengan penyusunan strategi yang sudah diorganisir dengan sebaiknya mampu memberikan hasil yang diharapkan, walaupun ditengah kerasnya persaingan partai politik dan munculnya banyak partai politik baru yang pada pemilu dengan mengatasnamakan Islam.

2. Penerapan Strategi DPC PPP Kota Padangsidimpuan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam pembuatan strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja yang telah mempertimbangkan peluang-peluang yang akan diperoleh.

¹⁰ Wawancara dengan Dedy Kurniawan Nasution, S.Pd.

¹¹ Wawancara dengan Muhammad Ali Siregar S. Sos.

Kampanye merupakan cara yang efektif menarik simpati masyarakat, yang mana tujuannya untuk membentuk image politik.

Strategi DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam meraih suara dalam pemilihan legislatif di Kota Padangsidimpuan lebih mengandalkan pola kampanye persuasif, yang bertujuan untuk memengaruhi dan meyakinkan orang lain. Sebagaimana telah dikemukakan di landasan teori bahwa model kampanye politik dalam penelitian ini adalah Teori perkembangan model kampanye lima tahap fungsional oleh Larson, yang mana fokus model ini adalah pada tahap kegiatan kampanye, meliputi tahap identitas, legitimasi, partisipasi, penetrasi, dan distribusi.

Konsep persuasif dijadikan PPP guna memperoleh suara dari para pemilih yang terdiri dari, model perkembangan kampanye:

a. Memperkenalkan Profil Kandidat

Pada tahap ini calon kandidat yang diusung oleh partai politik akan melakukan penciptaan identitas kampanye agar lebih mudah dikenali oleh khalayak masyarakat. Identitas tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan simbol, warna dan slogan.

Warna akan memberikan arti terhadap suatu objek, dengan demikian warna pada umumnya digunakan oleh para calon anggota legislatif untuk alat peraga kampanye yang disesuaikan dengan identitas masing-masing partai yang diwakilinya.

Sebagai contoh warna hijau adalah identik oleh calon legislatif PPP, kuning dari partai Golkar, merah PDIP, biru PAN, ungu partai Demokrat, dan lain-lain. Warna memang salah satu simbol partai yang menarik, mudah diingat. Saking melekatnya warna sebagai identitas partai, maka seseorang akan selalu mengaitkan warna yang dipilih atau yang dipakai seseorang dengan partai tertentu.

Begitu besarnya pengaruh penggunaan warna, seorang caleg melakukan warnasisasi terhadap barang-barang atau benda-benda yang dimilikinya. Adapun identitas lainnya adalah logo atau lambang dan slogan partai yang berfungsi untuk mempermudah agar dikenali masyarakat juga sekaligus membantu calon legislatif memperkenalkan visi dan misi program yang akan diperjuangkannya. Hal ini diungkapkan oleh Kadir Pandapotan M.A:

“.....PPP selalu mengaplikasikan penggunaan warna, logo/lambang atau sejenisnya, agar lebih mudah dikenali oleh khlayak walaupun PPP merupakan partai lama, penggunaan tersebut merupakan ciri khas yang membedakan dengan partai lain, PPP identik warna hijau dan konsisten dengan nilai-nilai Islam yang berpegang teguh pada prinsip keadilan, Amar Ma’ruf Nahi Munkar, itu termasuk kegiatan yang dilakukan untuk mendongkrak peningkatan suara PPP”¹²

Dalam hal slogan Dewan Pimpinan Cabang PPP selalu berkaitan dengan nilai-nilai Islam dan mengutamakan kepentingan rakyat. Sesuai dengan lambang Ka’bah sebagai penanda pemersatu umat Islam. Begitu juga

¹² Wawancara pribadi dengan Kadir Pandapotan Sekretaris Pengurus Harian DPC PPP Kota Padangsidimpuan, 4 Juni 2018, pukul 14:30 WIB.

apabila dilihat dari slogan yang digunakan PPP “Bekerja Bersama Rakyat”. Dengan demikian, PPP mengutamakan kepentingan umat demi terwujudnya masyarakat yang menjunjung keharmonisan, ketentraman, keadilan, persamaan dan selalu menjunjung nilai-nilai keislaman. Seperti diungkapkan oleh Muhammad Tausa Pane:

“kampanye merupakan cara penyampaian pesan yang perlu adanya slogan yang menjadi semangat program-program yang akan diaplikasikan kedepan atau penanda untuk memperkenalkan profil kandidat yang diusung oleh partai politik. Seperti halnya PPP yang memiliki slogan Bekerja Bersama Rakyat”.¹³

Dengan menggunakan strategi memperkenalkan profil kandidat dapat menarik simpatik masyarakat pemilih dalam memberi suara terhadap calon kandidat tersebut, sehingga dengan ini peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat apakah program kampanye dengan mengenalkan profil kandidat yang diusung oleh partai PPP, melalui cara slogan, simbol, warna sudah di aplikasikan dengan semestinya. Dapat dilihat dari hasil wawancara di bawah ini:

“ Sejujurnya saya tidak tahu mengenai kampanye yang dilakukan PPP dan saya juga tidak mengetahui bahwa PPP itu merupakan partai Islam yang sudah lama bahkan sudah memiliki sejarah panjang, pada saat pemilu saya hanya melihat dari tokohnya yang paling eksis dibicarakan pada saat sebelum menjelang pemilu.”¹⁴

¹³ Wawancara dengan Muhammad Tausa Pane.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Informan, Lenni Fitria Tanjung yang dilakukan pada tanggal 6 Juli 2018 di Kota Padangsidempuan.

“saya tahu bahwa PPP itu merupakan partai yang berbasis Islam, dan mengenai kampanye yang dilakukan partai tersebut dengan mengenalkan profil kandidat saya tahu dilihat dari simbol partai yang di tempel di sekitar kawasan masyarakat, serta pengenalan profil calon pada saat kampanye dilakukan PPP selalu mengucapkan visi dan misi serta slogan yang menjadi pembeda mereka dengan partai lain”.¹⁵

“Saya tahu partai PPP partai Islam tetapi, menurut saya baik partai Islam maupun partai yang lain sama saja. Karena tidak terlihatnya pengaruh yang signifikan dari partai Islam dan yang lain dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat seperti, masih banyak kemiskinan yang menyebabkan pendidikan rendah”.¹⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa, strategi pengenalan profil kandidat yang dilakukan oleh partai PPP sudah dilakukan sesuai dengan konsep, akan tetapi faktanya dalam masyarakat masih ada masyarakat yang tidak mengetahui partai PPP merupakan partai Islam dan partai yang sudah memiliki sejarah panjang dalam perjuangan Indonesia, berarti proses kampanye pengenalan profil kandidat masih kurang maksimal diterapkan.

b. Membangun Pendekatan Kelompok

Komunikasi kelompok merupakan sebuah kegiatan atau interaksi yang dilakukan oleh beberapa orang didalam sebuah perkumpulan seperti, pertemuan, diskusi, rapat atau berkumpul disuatu tempat. Dengan kata lain,

¹⁵ Hasil wawancara dengan Informan, Ahmad Dahlan yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2018 di Kota Padangsidempuan.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Informan, Pahrudin yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2018 di Kota Padangsidempuan.

komunikasi kelompok adalah sebuah pertukaran informasi atau pesan yang terjadi secara langsung atau bertatap muka.

Setiap kelompok akan memiliki sebuah citra yang baik dimata masyarakat. Sehingga, dapat menjadi jembatan antara individu dengan masyarakat. Saluran ini dapat membantu seorang calon legislatif dalam sebuah partai politik tertentu untuk mewujudkan program kerja yang akan di kampanyekannya. Sebagai pengurus maupun anggota kelompok sangat penting memiliki *image* yang baik sehingga akan mudah membangun hubungan emosional dengan khlayak. Seperti diungkapkan oleh Ahmad Solih Siregar:

“.....Kita DPC PPP Kota Padangsidempuan membangun pendekatan silaturahmi dengan kelompok jaringan seperti organisasi-organisasi yang diharapkan dapat membantu untuk memperoleh suara pada pemilihan legislatif di Kota Padangsidempuan”.¹⁷

Dari hasil pemaparan diatas peneliti melakukan wawancara dengan pengurus ormas dalam memberikan masukan atau gagasan terhadap pemenangan calon anggota legislatif.

“Sebagai salah satu kelompok organisasi Islam. Kita selalu menjalin hubungan silaturahmi dengan Partai PPP serta memberikan masukan kepada masyarakat pemilih, agar ikut andil dalam memberikan dukungan bagi calon pemimpin yang diusung oleh partai Islam. Adapun tempat yang di pilih untuk menyampaikan masukan ide atau gagasan tersebut pada saat pertemuan-pertemuan, diskusi, pengajian baik itu di masjid atau di madrasah dan sekolah-sekolah Muhammadiyah lainnya.”¹⁸

¹⁷ Wawancara pribadi dengan Ahmad Solih Siregar.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Amil Mahzul Nasution. 6 Juli 2018 di Kota Padangsidempuan.

“Secara Organisasi kami selalu membuka pintu untuk partai-partai yang datang dalam hal menjalin silaturahmi yang lebih akrab. Kami tidak memberi batasan bagi partai yang ingin menjalin hubungan kerabat dengan kami, mengenai masalah ikut andil dalam pemenangan calon anggota legislatif kami tidak ada memberikan masukan atau arahan kepada masyarakat agar mutlak berorasi pilihlah partai Islam ini karna akan me bawa kita kepada ini...ini... tidak ada, tapi kami sering juga me bentuk diskusi dengan partai Islam, tetapi itu tidak hanya dari satu partai seperti PPP, ada juga yang dari PAN, GOLKAR, itu juga kita libatkan asalkan mempunyai itikad baik.”¹⁹

“Sebenarnya kalau dalam hal dukung mendukung partai politik, kita tidak ada karna kita bukanlah kelompok yang parpol melainkan kita adalah organisasi kepemudaan Islam, tapi kita tetap berpartisipasi mensukseskan pemilihan dengan memberikan suara dalam pemilihan legislatif, artinya ya bagaimanapun posisi kita maka prinsip kita tidak kemana-mana, tetapi kita ada dimana-mana, jadi kita tidak bisa mengklaim yang ini, kalau kita bicara kader secara person bisa jadi iya, kembali ke kata kuncinya tadi, kita itu tidak kemana-mana tapi ada dimana-mana.”²⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat diuraikan, bahwa dalam membangun citra yang baik bagi kandidat partai yang diusung tidak ada unsur bantuan dalam hal pemenangan pemilihan legislatif di Kota Padangsidempuan, akan tetapi ormas-ormas Islam ataupun organisasi kepemudaan itu tetap berpartisipasi dalam mensukseskan pemilihan legislatif di Kota Padangsidempuan. Serta hubungan silaturahmi tetap terjaga dengan baik.

¹⁹Wawancara dengan Bapak Syawaluddin Hasibuan. 5 Juli 2018 di Kota Padangsidempuan.

²⁰Wawancara dengan . Selasa, 5 Juli 2018 di Kota Padangsidempuan.

c. Pendekatan Saluran Struktur Tradisional

Saluran komunikasi politik struktur sosial tradisional, yaitu dimana arus komunikasi yang ditentukan oleh posisi sosial yang berkomunikasi dalam hal ini adalah PPP Kota Padangsidempuan. Saluran komunikasi tradisional ini dianggap cocok dengan adat istiadat masyarakat itu sendiri. Bertujuan untuk melihat langsung apa yang menjadi masalah masyarakat dan dianggap mampu mengambil simpati masyarakat karna dalam komunikasi tradisional ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung.

Dalam hal ini DPC PPP Kota Padangsidempuan membangun komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, ulama, pondok pesantren dan majelis taklim.

“.....ada gerakan – gerakan baru yang termasuk tidakan sosial yaitu gerakan nasional wakaf alquran memberi alquran kepada alim ulama, mesjid-mesjid, pondok pesantren setelah itu dilakukan juga gerakan nasional shlawatan yang mana itu termasuk pola-pola kampanye yang dipakai PPP dalam memenangkan calon legislatif, mengundang tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat dengan *face to face* dengan menjaring orang-orang yang dapat dipercaya, dilakukan pada saat itu dua kategori siapa yang dapat direkrut, itu adalah saudara sedarah dan kawan dekat, kategori kawan dekat yaitu kawan yang sudah berkawan minimal tiga tahun disinilah mengukur solidaritasnya”.²¹

“kami menjalin komunikasi dengan masyarakat dengan berbagai elemen masyarakat seperti alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta’lim, dan karena PPP basisnya itu”²²

²¹ Wawancara dengan Kadir Pandapotan.

²² Wawancara dengan hasanuddin Sipahutar.

Kalimat yang samapun diungkapkan oleh M. Tohir Nasution:

“....disamping itu juga kami tetap menggunakan komunikasi melalui para tokoh masyarakat dan ulama, dan untuk ulamanya kita menggunakan ulama yang ada dimasyarakat, dan karena memang basic kita kan yang berbasis Islam itukan peran tokoh-tokoh tua yah”²³

Untuk mengetahui bagaimana strategi pendekatan sosial tradisonal yang dilakukan PPP maka peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang bersangkutan. Wawancara dengan Hamdan Nasution:

“ Kalo untuk pendekatan silaturahmi yang dilakukan PPP ke saya dikatakan politik ya saya tidak tahu. Saya menganggap bahwa itu bukanlah suatu unsur politik karna saya pribadi tidak mengerti apa politik, mereka hanya datang meminta agar saya berkenan memberikan ceramah di mesjid, pengajian, sekaligus mengarahkan mereka untuk mengumpulkan anak yatim untuk diberi bantuan. Maka menurut saya itu tindakan yang sangat baik apalagi memberi pengetahuan agama kepada masyarakat serta memberi santunan kepada anak yatim, itu semua kan wajib kita lakuakn sebagai umat nabi Muhammad”²⁴

“iya, saya sangat familiar dengan partai PPP karena mereka adalah partai yang sangat konsisten dengan nilai-nilai Islam, mengutamakan amanat penderitaan rakyat dan menjunjung tinggi nilai pancasila, mereka sering memberi pengajian-pengajian, dan mengunjungi pondok pesantren”²⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat diuraikan, bahwa PPP memang melakukan pengajian-pengajian, dan ceramah dengan mengundang tokoh agama serta alim ulama di masyarakat akan tetapi itu hanya ditujukan bagi

²³ Wawancara dengan M. Tohir Nasution, 7 Juli 2018 di Kota Padangsidempuan.

²⁴ Wawancara dengan Hamdan Nasution 7 Juli 2018 di Kota Padangsidempuan.

²⁵ Wawancara dengan muhammad jein 7 Juli 2018 di Kota Padangsidempuan.

kalangan tua saja, seharusnya bagi kalangan pemuda dilakukan semacam perkumpulan kelompok untuk berdiskusi mengenai agama, dan berkreasi serta membuat kelompok usaha bagi generasi muda mudi.

3. Kelemahan dan Kelebihan PPP dalam Meraih Suara Pada Pemilihan

Legislatif 2014 Di Kota Padangsidimpuan.

Berbicara tentang kelebihan dan kelemahan dari suatu partai merupakan cara yang dapat dijadikan sebagai kontribusi dan wacana untuk mengetahui sejauh mana perkembangan suatu partai dalam mempertahankan keeksistensian. Serta dapat mendorong para kalangan partai untuk mengkaji lebih lanjut mengenai problem apa yang dimiliki partai itu sendiri.

Dengan demikian untuk melihat kelebihan dan kelemahan yang dimiliki partai PPP dalam meraih suara pada pemilu dilakukan wawancara dengan pengurus atau pejabat yang berkaitan. Adapun hasil wawancara dengan pengurus PPP mengenai kelebihan partai PPP adalah:

Wawancara dengan Maharani Harahap S. Sos :

“.....PPP merupakan partai lama yang berasaskan Islam yang tidak perlu lagi diterangkan kepada masyarakat, kita partai Islam.....tidak perlu lagi dan sudah mempunyai program-program yang mengutamakan kesejahteraan umat.....sedangkan kekurangannya, kita PPP itu rata-rata yang berada di struktur Partai Persatuan Pembangunan adalah menegah kebawah sehingga memungkinkan PPP itu memiliki keterbatasan dana
”²⁶

²⁶ Wawancara pribadi dengan Maharani Harahap S.sos.

Wawancara dengan Irsan Haposan Lubis:

“.....PPP adalah salah satu partai tua yang sudah memiliki pengalaman yang matang dalam sejarah perjuangan Indonesia. Sedangkan kelemahan dari PPP adalah terletak pada keterbatasan dana kita, ya kalau dibandingkan dengan partai lain, PPP termasuk partai yang kekurangan dana untuk menjalankan strategi-strategi yang sudah kita susun. Terlalu mengandalkan tokoh kita terlalu percaya pada dan terlalu mengandalkan tokoh-tokoh yang mana mungkin partai lain juga mendekati serta memberikan kontribusi yang lebih kepada mereka .²⁷

Kelemahan dan kelebihan dari PPP yang diungkapkan Dedy Kurniawan

S. Pd:

“.....kelebihan dari PPP kita tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam dan sekaligus itu menjadi kelemahan, yang mana sekarang partai Islam sudah tidak milenial lagi bagi kalangan pemula dibandingkan dengan partai nasional, lemahnya SDM PPP dari rekrutmen kader dan belum adanya kader-kader yang berkompeten dan berkomitmen utuh, padahal tingkat kepengurusan PPP sudah komplit dari tingkat ranting sampai tingkat nasional, akan tetapi tidak didukung oleh SDM yang mumpuni’`.²⁸

Kelebihan yang dimiliki Partai Persatuan Pembangunan yaitu, PPP merupakan partai lama dan partai yang selalu konsisten membawa identitas nilai-nilai Islam. PPP juga merupakan partai yang sudah merakyat karena punya riwayat panjang sebagai fusi dari partai-partai yang berbasis Islam.

Sehingga yang menjadi kelemahan dari Partai Persatuan Pembangunan adalah partai memiliki yang memiliki keterbatasan dana, terbatasnya dana yang dimiliki PPP membuat penerapan strategi-strategi yang telah disusun dan teroganisir dilakukan secara tidak maksimal. Selanjutnya, Partai Persatuan

²⁷ Wawancara pribadi dengan Irsan Haposan Lubis.

²⁸ Wawancara pribadi dengan Dedy Kurniawan S. Pd.

Pembangunan adalah partai yang mengandalkan tokoh-tokoh pemuka agama yang mana hal tersebut membuat tokoh-tokoh tersebut kalah pamor dari partai nasional.

Partai Persatuan Pembangunan selalu berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang relegius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan dan taat hukum, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisonal dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul tentang Strategi Dewan Pimpinan Cabang PPP dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Padangsidempuan. Dari hasil penelitian yang di peroleh dari wawancara, dapat dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penyusunan Strategi PPP Dalam Meraih Suara Pada Pemilihan legislatif Di Kota Padangsidmpuan

Penyusunan strategi DPC PPP dalam meraih suara pada pemilihan legislatif di Kota Padangsidempuan merupakan hasil diskusi dan analisis bersama atau yang dikenal dengan rakerwil (rapat kerja wilayah) dengan PAC dan Pimpinan Ranting. Setelah dilakukannya pembagian tugas, barulah kemudian dibentuk tim pemenang. Dimana setiap tim sukses dari DPC PPP

haruslah mempunyai mata dan telinga yang berada di setiap kampung, yaitu Pokja, Pokja adalah kelompok kerja di setiap kampung dan bertugas untuk menggali informasi dari masyarakat, setelah informasi diperoleh maka dilaporkan kepada DPC PPP.

Pesan yang disampaikan dan sudah diorganisir dengan baik belum cukup untuk memengaruhi khalayak. Diperlukan juga komunikator terpercaya untuk menyampaikan pesan tersebut.

2. Penerapan Strategi DPC PPP Kota Padangsidempuan

Strategi DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam meraih suara dalam pemilihan legislatif di Kota Padangsidempuan lebih mengandalkan pola kampanye persuasif yang bertujuan untuk memengaruhi dan meyakinkan orang lain, konsep persusif dijadikan PPP untuk memperoleh suara dari para pemilih yang terdiri dari:

a. Memperkenalkan Profil Kandidat

Konsep kampanye dalam memperkenalkan kandidat yang digunakan oleh PPP ialah dengan penggunaan simbol, warna, slogan untuk memperoleh suara serta mengenalkan partai kepada masyarakat. Akan tetapi dalam hal pengaplikasian ternyata masih ada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa PPP adalah partai Islam yang sudah memiliki sejarah panjang dalam perjuangan Indonesia, ternyata masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa dalam hal pemilihan masyarakat sudah mulai terkikis kepercayaan terhadap partai baik yang berbasisi Islam maupun tidak

diakibatkan karena janji-janji kampanye yang dilakukan seringkali dilupakan.

b. Membangun Pendekatan Kelompok

Membangun kelompok merupakan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu partai politik dalam mensukseskan tujuannya. PPP selalu menjalin pendekatan yang baik dengan kelompok-kelompok ormas Islam, dalam hal menjalin hubungan yang baik melalui silaturahmi, PPP berharap bahwa hubungan kelompok yang djalin ini akan berdampak baik, bagi partai maupun bagi kelompok tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan ormas yang ada di Kota Padangsidempuan peneliti memperoleh hasil bahwa dalam membangun citra yang baik bagi kandidat partai atau dalam hal memberikan ide atau masukan agar kandidat memeperoleh tujuannya ormas tersebut tidak ada memberikan unsur bantuan. Akan tetapi ada juga ormas yang dalam melakukan kegiatan ceramah mengarahkan agar masyarakat bijak dalam memilih pemimpinnya, dan sebaiknya pilihlah pemimpin yang berasal dari golongan yang sama.

Sebagai warga negara yang baik yang taat akan hukum ormas-ormas Islam ataupun organisasi kepemudaan itu tetap berpartisipasi dalam mensukseskan pemilihan legislatif di Kota Padangsidmpuan. Serta hubungan silaturahmi tetap terjaga dengan baik.

c. Pendekatan Saluran Struktur Tradisional

Saluran komunikasi politik struktur sosial tradisional, yaitu dimana arus komunikasi yang ditentukan oleh posisi sosial yang berkomunikasi. Dalam membangun saluran struktur tradisional PPP Kota Padangsidimpuan membangun komunikasi dengan pendekatan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, ulama, pondok pesantren dan majelis taklim.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti, PPP memang melakukan pengajian-pengajian, dan ceramah dengan mengundang tokoh agama serta alim ulama di masyarakat akan tetapi itu hanya ditujukan bagi kalangan tua saja, seharusnya bagi kalangan pemuda dilakukan semacam perkumpulan kelompok untuk berdiskusi mengenai agama, dan berkreasi serta membuat kelompok usaha bagi generasi muda mudi. Agar saluran komunikasi tradisional yang diterapkan oleh PPP terrealisir dari semua lapisan.

3. Kelemahan dan Kelebihan PPP dalam Meraih Suara Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Padangsidimpuan.

a. Kelebihan Partai Persatuan Pembangunan yaitu:

1. Partai PPP merupakan partai yang berasaskan Islam.
2. PPP merupakan partai yang sudah memiliki sejarah panjang dalam perjuangan Indonesia dan terutama pentas perpolitikan tanah air.
3. PPP itu identik dengan program-program yang mengutamakan kesejahteraan umat, selalu menegakkan keadilan, persamaan, keharmonisan, itulah yang menjadi kelebihan dari partai PPP.

4. PPP memiliki visi dan misi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Islam, tanpa bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang.
- b. Kelemahan Partai Persatuan Pembangunan yaitu:
1. PPP itu selalu identik dengan tokoh-tokoh tua, sehingga kaum milenial sekarang ini tidak tertarik dengan partai yang tidak mengikuti perkembangan jaman.
 2. Kelemahan selanjutnya itu dilihat dari lemahnya SDM partai PPP, banyak program-program yang sudah terorganisir dengan baik akan tetapi dalam hal pengaplikasiannya terhambat oleh SDM.
 3. Kelemahan yang terakhir, yaitu PPP memiliki keterbatasan dana, dimana rata-rata struktur yang ada di PPP memiliki ekonomi menengah ke bawah.

Akan tetapi Partai Persatuan Pembangunan selalu berjuang memperbaiki apa-apa yang menjadi kekurangan dari partainya demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan dan taat hukum, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

Dari hasil observasi yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa adapun penyebab turunnya hasil suara partai PPP Kota Padangsidimpuan:

- a. Partai PPP kalah pamor dengan partai yang tidak berbasis Islam
- b. Berubahnya orientasi masyarakat dalam memilih.
- c. Lemahnya SDM dari PPP Kota Padangsidempuan.
- d. Pola segmentasi yang dilakukan belum sampai kepada semua lapisan.
- e. Kurangnya performa komunikatif yang dilakukan PPP.

Namun walaupun demikian PPP selalu beikhtiar untuk menjaga menjaga eksistensinya sebagai organisasi politik, dan diharapkan dengan penyusunan strategi yang sudah diorganisir dengan sebaiknya mampu memberikan hasil yang diharapkan, walaupun ditengah kerasnya persaingan partai politik dan munculnya banyak partai politik baru yang pada pemilu dengan mengatasnamakan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kelemahan dan kelebihan dari PPP

Kelebihan dari Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai lama dan partai yang selalu konsisten membawa slogan nilai-nilai Islam. PPP juga merupakan partai yang sudah merakyat karena punya riwayat panjang sebagai fusi dari partai-partai yang berbasis Islam.

Sehingga yang menjadi kelemahan dari Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satu partai memiliki keterbatasan dana, terbatasnya dana yang dimiliki PPP membuat penerapan strategi-strategi yang telah disusun dan teroganisir dilakukan secara tidak maksimal. Penyusunan Strategi DPC PPP Kota Padangsidimpuan.

2. Proses penyusunan strategi DPC PPP dalam meraih suara pada pemilihan caleg di Kota Padangsidimpuan yaitu:

- a. Mengusung caleg yang memang berkompeten dan menarik.
- b. Melakukan pemetaan wilayah, personil, dan anggaran.
- c. Membentuk tim sukses yang terdiri dari pokja (kelompok kerja), satgas (satuan tugas), korwil (kordinasi wilayah).
- d. Membuat isu politik.

- e. Menyusun konsep kampanye.
 - f. Mempersiapkan program kerja yang akan ditawarkan kepada masyarakat.
 - g. Membuat jadwal rencana kunjungan ke masyarakat.
3. Penerapan Strategi DPC PPP Kota Padangsidempuan

- a. Memperkenalkan Profil Kandidat

Pada tahap ini calon kandidat yang diusung oleh partai politik akan melakukan penciptaan identitas kampanye agar lebih mudah dikenali oleh khalayak masyarakat. Identitas tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan simbol, warna dan slogan.

- b. menggunakan saluran kelompok
- c. Menggunakan komunikasi antarpribadi
- d. Menerapkan Komunikasi tradisional

Persuasif sebagai tindakan komunikasi yang bertujuan untuk membuat khalayak melakukan suatu hal atau melakukan suatu tindakan. Strategi persuasif yang dapat digunakan dalam praktek kampanye yakni:

- a. Memilih komunikator yang terpercaya
- b. Mengemas pesan sesuai keyakinan khalayak
- c. Menggunakan strategi pelibatan
- d. Membangun resistansi khalayak terhadap pesan negatif.

Dari strategi yang diterapkan oleh PPP Kota Padangsidempuan belum maksimal diaplikasikan, dimana perolehan suara yang di peroleh belum menunjukkan peningkatan jumlah suara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti yang mana bertujuan agar diharapkan mampu memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Agar dalam penyusunan dan penerapan strategi PPP harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sebenarnya yang ingin dicapai, dan siapa yang menjadi sasaran, pesan apa yang akan disampaikan, bagaimana menyampaikannya serta terakhir bagaimana mengevaluasinya. Sehingga dengan perencanaan yang terorganisir dapat menciptakan citra positif partai dan menarik simpati para simpatisan. Selain itu juga agar DPC PPP semakin jeli dan kritis melihat gejala-gejala situasi masyarakat apa yang mereka harapkan dan butuhkan. Sehingga nantinya dalam menyusun dan menerapkan strategi partai nantinya banyak manfaat bagi semua khalayak.
2. Dalam upaya kaderisasi diharapkan lebih memantapkan sistem pengkaderan dan bagi kader-kader hendaknya memiliki komitmen untuk terus berkontribusi aktif di PPP, dan bagi kader-kader pemuda hendaknya lebih intens lagi agar tidak terjadi stagnasi kader muda pada diri PPP dan bagi kader-kader PPP senior agar lebih memberi ruang untuk sama-sama berjuang.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih mempertajam lagi fokus kajian dengan meneliti kasus-kasus yang terjadi di DPC PPP Kota Padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Badan Pusat Statistik (BPK) Kota Padangsidimpuan, tentang Jumlah Penduduk Muslim Di Kota Padangsidimpuan.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bono Setyo, “Membangun Model Kampanye Politik Berbasis Silaturahmi Bagi Calon Legislatif Incumbent Kabupaten Klaten Dalam Pemilu 2014”, vol. 06. No. 2, Oktober 2013.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Christianto Pontoh, “Strategi Kampanye Pemenangan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Dalam Jurnal Acta Diurna Volume IV. No. 1. Tahun 2015.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Departemen Agama Negeri, *Al-quran dan TejemahNya*, Bandung : CV Penerbit J-Art.
- Dwi Noviani, “Strategi Politik PPP dalam Memenangkan Calon Legislatif Perempuan Menghadapi Pemilihan Umum 2014 di Kota Tanjungpinang” skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang: 2015.
- Eddy Kurniadi, *Peranan Pemuda dalam Pembangunan Politik di Indonesia*, Bandung:Angkasa, 1998.
- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik (Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Hasil wawancara dengan Informan, Pahrudin yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2018 di Kota Padangsidimpuan.
- Hasil wawancara dengan Informan, Ahmad Dahlan yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2018 di Kota Padangsidimpuan.

Hasil wawancara dengan Informan, Lenni Fitria Tanjung yang dilakukan pada tanggal 6 Juli 2018 di KotaPadangsidimpuan.

<http://kbbi.web.id-Kampanye>, di akses pada tanggal 23/05/2018, pukul 13:23 WIB.

<http://kompasiana.com/strategi-pemenangan-partai-dalam-kontestasi-pemilu-2014>, diakses pada tanggal 19/03/2018, pukul 22:00 WIB.

<http://nasional.kompas.com.Strategi-Baru-PPP>. Di akses pada tanggal 26/04/2018, pukul 21:19 WIB.

<http://pakarkomunikasi.comStrategi-Komunikasi-Politik-Unsur-Tahapan>, di akses pada tanggal Mei 2018, pukul 22:45 WIB.

Jalaluddin Rakhmat, *Manajemen Kampanye*, Bandung: Simbiosis, 2004.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Kaka Alvian Nasution, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, Jakarta: Saufa, 2014.

Kamus Baku Dasar Bahasa Indonesia, Solo: C. V Aneka, 1993.

Ketetapan HasilMuktamar VIII PPP Tentang AnggaranDasar Pasal 4.

Ketetapan Muktamar VIII PPP Tentang Anggaran Rumah Tangga Pasal 1.

Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012.

Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan, Model-EB.

Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Lihat Undang-Undang No.31 Tahun 2002 Republik Indonesia.

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta:Rineka Cipta, 2005.

Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

MiftahToha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2012.

- Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum UI, 1983.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara In donesia*, Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum UI, 1983.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyash*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001.
- Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Asdi Mahasadya, 2004.
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Salinan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas perubahan UU No 10 Tahun 2008, Ketentuan Umum BAB 1 ayat 1.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Toni Adrianus Pito, *Adrianus Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi*, Bandung: Penerbit Nusantara, 2006.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tujuan Partai Politik Pasal 10.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 3.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas perubahan UU No 10 Tahun 2008, Ketentuan Umum BAB 1 ayat 1.
- Wawancara dengan Bapak Amil Mahzul Nasution. 6 Juli 2018 di Kota Padangsidempuan.
- Wawancara dengan Bapak Syawaluddin Hasibuan. 5 Juli 2018 di Kota Padangsidempuan.

Wawancara dengan pribadi dengan Hamdan Nasution 7 Juli 2018 di Kota Padangsidimpuan.

Wawancara dengan pribadi dengan M. Tohir Nasution, 7 Juli 2018 di Kota Padangsidimpuan.

Wawancara dengan pribadi dengan muhammad jein 7 Juli 2018 di Kota Padangsidimpuan.

Wawancara pribadi dengan Ahmad Solih Siregar.

Wawancara pribadi dengan Dedy Kurniawan S. Pd.

Wawancara pribadi dengan Hasanuddin Sipahutar Pengurus Harian DPC PPP Kota Padangsidimpuan, 26 April 2018, pukul 15:37 WIB.

Wawancara pribadi dengan Kadir Pandapotan Sekretaris Pengurus Harian DPC PPP Kota Padangsidimpuan, 4 Juni 2018, pukul 14:30 WIB.

Wawancara pribadi dengan Maharani Harahap, S.sos.

Wawancara pribadi dengan Muhammad Tausa Pane.

Wawancara pribadi dengan Muhammad Ali Siregar S. Sos.

Zein Abdullah, *Strategi Komunikasi Politik dan Penerapannya*, Bandung: Simbiosis, 2008.

DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Desi Ratna Sari
Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Air Putih, 12 Desember 1995
Nim : 1410300008
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.
2. Nama Orang Tua
Ayah : Alm. Himsar Siregar
Pekerjaan : -
Ibu : Rosmina Nasution
Pekerjaan : Petani
Alamat : Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.
3. Pendidikan
 - a. SD Negeri 142548 Simangambat, Tamat Tahun 2009
 - b. SMP Negeri 4 Siabu, Tamat Tahun 2011
 - c. Madrasah Aliyah Negeri Siabu, Tamat Tahun 2014
 - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B-394 /In.14/D.4c/TL.00/04/2018

17 April 2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
Partai Persatuan Pembangunan Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Desi Ratna Sari
NIM : 1410300008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Sihitang Raya

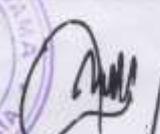
adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Strategi Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Legislatif Periode 2009-2014 di Kota Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Anmatnizar, M.Ag
NIP 196802022000031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B-394 /In.14/D.4c/TL.00/04/2018

17 April 2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
Partai Persatuan Pembangunan Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Desi Ratna Sari
NIM : 1410300008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Sihitang Raya

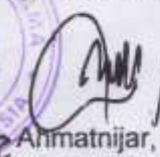
adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Strategi Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Legislatif Periode 2009-2014 di Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Ap. Anmatnizar, M.Ag
NIP 196802022000031005